



**DINAS
DUKCAPIL
KAB. BARSEL**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LaKIP) TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LaKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menyajikan capaian kinerja atas sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sepanjang Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui penguatan sistem pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi menjadi motivasi untuk terus berbenah demi terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada periode berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel atas pelaksanaan tugas serta menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Buntok, Pebruari 2026

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Selatan**



Drs. SABIRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199012 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah1

1.2 Isu Strategis Yang Dihadapi5

1.3 Dasar Hukum6

1.4 Sistematika Laporan 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 20259

2.2 Indikator Kerja Utama (IKU)11

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025.....11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

3.1 Capaian Kinerja Organisasi13

3.2 Capaian Kinerja berdasarkan Target Kinerja Nasional bidang Adminduk.....15

3.3 Analisis Keberhasilan dan Hambatan Pencapaian Kinerja15

3.4 Realisasi Kinerja Anggaran19

3.5 Analisis Efesiensi.....23

BAB IV PENUTUP..... 24

LAMPIRAN 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah.

Gambar 1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan



Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan selaku Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Perubahan tersebut adalah kenaikan Tipologi Dinas dari yang semula Dinas Tipe B naik menjadi Dinas Tipe A, dengan penambahan 1 (satu) Bidang yang merupakan pemekaran dari Bidang yang sudah ada.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan yang baru ini dijabarkan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

1.1.1. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Selatan di bidang Administrasi Kependudukan.

1.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi :



- a) Perumusan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan;
- d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f) Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerja Sama serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

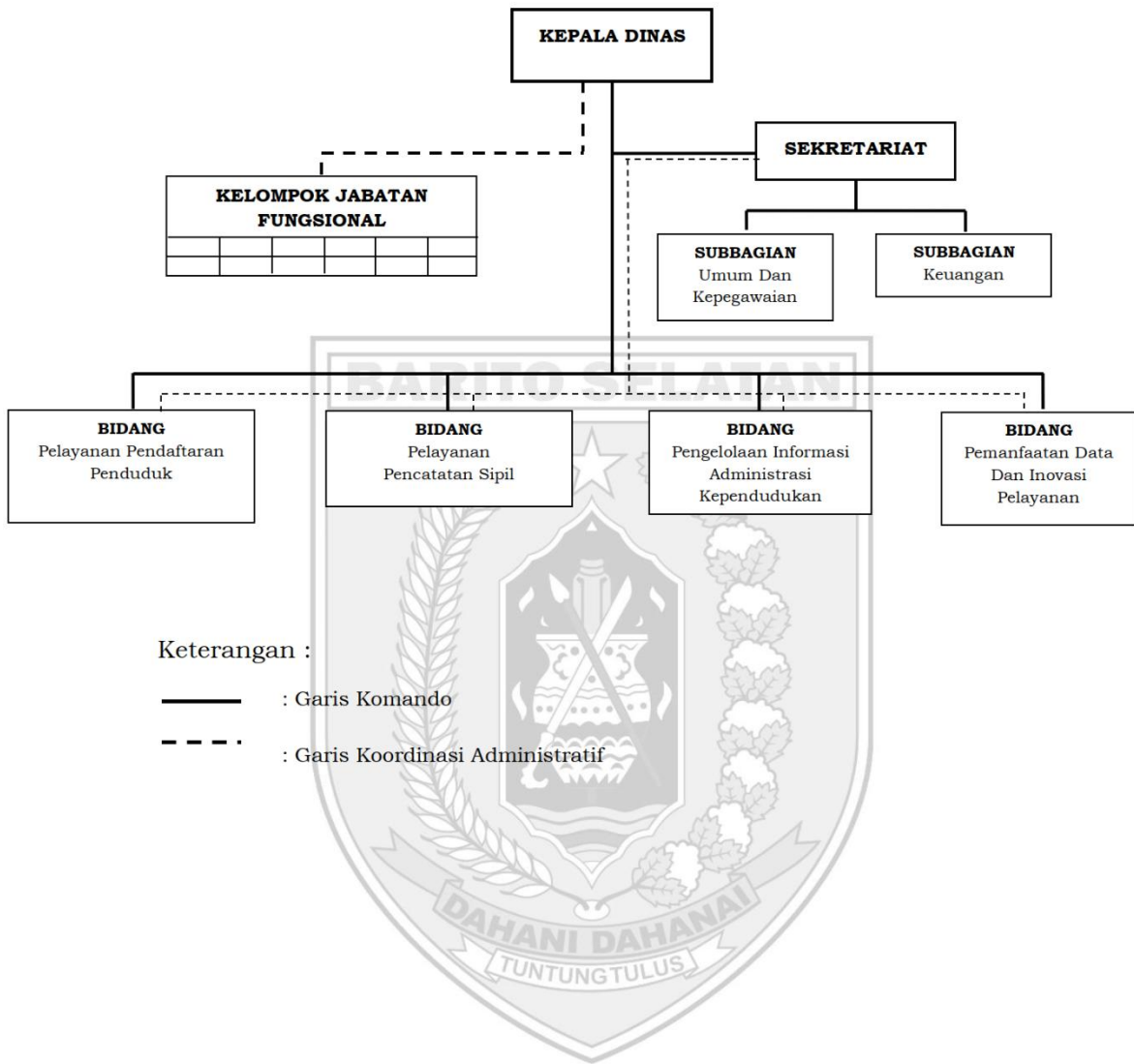
1.1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

- a) Kepala Dinas ;
- b) Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana pada Gambar 2 berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan



1.1.4. Komposisi Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan memiliki sumber daya manusia dengan komposisi SDM (Keadaan Per 31 Desember 2025) :

Tabel 1. Jumlah komposisi SDM (Pegawai) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negara Sipil (PNS)	25
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	10
3	Tenaga Kontrak (Honorar)	1
Jumlah		36

Sumber Data : Data Pegawai Bulan Desember 2025

Tabel 2. Jumlah komposisi SDM (Pegawai) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	7
2	S-1	18
3	D-4	-
4	D-3	-
5	SLTA	10
6	SLTP	1
Jumlah		36

Sumber Data : Data Pegawai Bulan Desember 2025

1.1.5. Fasilitas Kantor dan Peralatan Kerja :



Gambar 3. Loker Pelayanan Adminduk DUKCAPIL Kab. BaritoSelatan



Gambar 4. Ruang Perekaman KTP-el



Gambar 5. Ruang operator SIAK



Gambar 6. Ruang Tunggu Pelayanan Adminduk Dinas DUKAPIL Kab. Barito Selatan

1.2. Isu Strategis Yang Dihadapi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, terdapat sejumlah isu strategis yang mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi. Isu strategis ini disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja, dinamika kebijakan nasional, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

- 1) Peningkatan Kualitas dan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
Masih terdapat beberapa cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang capaiannya masih rendah/kurang, seperti Cakupan Perekaman KTP-el, Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-18 tahun, dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan ini merupakan target kinerja nasional di bidang pelayanan administrasi kependudukan, sehingga perlu dilakukan percepatan pelayanan melalui kegiatan jemput bola.
- 2) Peningkatan Kerja Sama dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
Kerja sama pelayanan terintegrasi dengan instansi penyedia layanan publik lainnya masih perlu ditingkatkan, pemanfaatan hak akses data kependudukan oleh lembaga/OPD pengguna belum terlaksana.
- 3) Pemanfaatan Layanan Berbasis Digital dan Pengembangan Inovasi Pelayanan
Perkembangan teknologi informasi menuntut pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan transparan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan telah memiliki inovasi pelayanan berbasis online, sehingga pemanfaatan pelayanan



berbasis daring (online) ini perlu terus didorong. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas inovasi pelayanan yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat, dengan terus melakukan pengembangan inovasi pelayanan.

4) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional dan responsif semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan front office, penyederhanaan prosedur, serta penguatan budaya pelayanan prima menjadi fokus strategis dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.

5) Penguatan Akuntabilitas dan Implementasi SAKIP

Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mendorong perlunya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran capaian, serta pelaporan yang akuntabel dan berbasis hasil (outcome). Penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja menjadi isu penting dalam peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah.

6) Keterbatasan Sarana Prasarana.

Keterbatasan sarana prasarana pelayanan yang masih belum memenuhi standar, masih menjadi tantangan dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Dukungan anggaran menjadi kebutuhan strategis untuk menjamin kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan.

1.3. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
20. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan.

1.4. Sistematika Laporan :

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan tentang gambaran umum perangkat daerah, isu strategis yang dihadapi organisasi, dasar hukum dan sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Anggaran Tahun 2025.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Memasuki Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yang kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan RENSTRA-PD terbaru Tahun 2025-2029 serta Rencana Anggaran berdasarkan APBD Perubahan sebagaimana berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok, Kalimantan Tengah 73711
Telepon (0525) 21597 Faksimile (0525) 21597
Website: dukcapil.baritoselatankab.go.id Email: dukcapil@baritoselatankab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SABIRIN, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**
Jabatan : Bupati Barito Selatan.

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

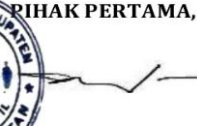
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 29 September 2025.

PIHAK KEDUA,


EDDY RAYA SAMSURI

PIHAK PERTAMA,


Drs. SABIRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199012 1 004

Lampiran Perjanjian Kinerja 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	NILAI	A
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Bebas dari Korupsi	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	NILAI	75,00
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	NILAI	3,10
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	NILAI	71,00

No.	Program	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.323.374.530	APBDP
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	396.662.600	APBDP
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	519.999.810	APBDP
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	535.427.150	APBDP
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100.309.500	APBDP
JUMLAH		6.875.773.590	

Buntok, 29 September 2025.

PIHAK KEDUA,

EDDY RAYA SAMSURI

PIHAK PERTAMA,

Dps SABIRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199012 1 004

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian atas sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan menetapkan beberapa Indikator Kerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan.	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 25$	Hasil Survey berdasarkan Kuesioner kepada Masyarakat yang mengurus dokumen Adminduk.
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Bebas dari Korupsi	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	Nilai akhir MCP dihitung berdasarkan bobot dan penilaian dari delapan area intervensi pencegahan korupsi yang dinilai. Setiap area memiliki indikator dan sub-indikator yang menjadi dasar perhitungan nilai, dengan nilai total dari semua area menjadi nilai MCP suatu daerah.	Hasil monitoring tahunan oleh KPK terhadap Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada level daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sesuai dengan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai.	Hasil Penilaian SPIP oleh BPKP atau Inspektorat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai hasil Evaluasi SAKIP DISDUKCAPIL	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat.

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Guna operasional pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan maka pada Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Murni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan menerima alokasi dana dari APBD Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 7.013.719.000,- kemudian melalui mekanisme perubahan APBD menjadi Rp. 6.875.773.590,08 sehingga terjadi penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 137.945.409,92 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Matrik APBD Murni dan APBD Perubahan Dinas DUKCAPIL Kab. Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	7.013.719.000,00	6.875.773.590,08	(137.945.409,92)
5.1	BELANJA OPERASI	6.735.375.000,00	6.776.733.590,08	41.358.590,08
5.1.01	Belanja Pegawai	2.686.284.176,00	2.988.805.466,08	302.521.290,08
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.049.090.824,00	3.787.928.124,00	(261.162.700,00)
5.2	BELANJA MODAL	278.344.000,00	99.040.000,00	(179.304.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.344.000,00	99.040.000,00	(179.304.000,00)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Target Kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 digambarkan dalam Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	A	A
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Bebas dari Korupsi	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	75,00	79,18
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,10	3,027 *
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71,00	65,45 *

Adapun Penjelasan Capaian Kinerja dari Target Kinerja Adalah :

1.	Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
	Target	:	A
	Capaian	:	A

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan administrasi kependudukan menunjukkan hasil **kategori A**, dengan **nilai IKM 91**, berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berada pada tingkat **sangat baik**. Capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui perbaikan prosedur layanan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Selain itu, responsivitas petugas dan kejelasan informasi pelayanan turut berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan administrasi kependudukan.

2.	Indikator Kinerja	: Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah
	Target	: 75,00
	Capaian	: 79,18

Capaian Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu **79,18**. Capaian ini menunjukkan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator MCP khususnya di areal pelayanan publik. Pencapaian target ini merupakan hasil dari sinergi antar perangkat daerah, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari instansi pengawas.

3.	Indikator Kinerja	: Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Target	: 3,10
	Capaian	: 3,027 (Tahun 2024)

Capaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggunakan nilai capaian pada tahun 2024 dengan Skor **3,027**, karena berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan BPKP untuk tahun 2025 Kabupaten Barito Selatan tidak dilakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern telah berada pada kategori **Level 3 (Terdefinisi)**, dalam artian **Pengendalian telah berjalan efektif, terdokumentasi, dan terintegrasi**. Hal ini mencerminkan bahwa perangkat daerah telah memiliki kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Peningkatan maturitas SPIP didukung oleh penguatan lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian intern.

4.	Indikator Kinerja	: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
	Target	: 71,00
	Capaian	: 65,45 (Tahun 2024)

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk tahun 2025 masih belum terbit dari Inspektorat Daerah, sehingga nilai capaian yang digunakan sementara masih menggunakan nilai capaian tahun sebelumnya (Tahun 2024).

3.2. Capaian Kinerja berdasarkan Target Kinerja Nasional bidang Administrasi Kependudukan.

Tabel 6. Realisasi Capaian Target Nasional Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota Tahun 2025
Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL 2025	REALISASI CAPAIAN 2025
1	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,40%	97,61%
2	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	97,00%	96,69%
3	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	60,00%	72,24%
4	Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30% dari Total Perekaman di daerah	7,72%

Dari pencapaian kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Target Kinerja Nasional Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Tahun 2025 di atas, hanya satu indikator kinerja kunci yang capaiannya masih rendah yaitu Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang hanya mencapai 7,72% dari target sebesar 30%. Sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja kunci lainnya rata-rata hampir mencapai target, bahkan salah satu indikator kinerja kunci yaitu Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah melebihi target yang ditetapkan, dengan realisasi capaian sebesar 72,24% dari target kinerja sebesar 60%.

3.3. Analisis Keberhasilan dan Hambatan Pencapaian Kinerja

3.3.1. Faktor Keberhasilan :

Telah dilaksanakannya upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan secara terus menerus, melalui penggalan ide-ide inovasi dan pengembangan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan baik melalui kegiatan pembelajaran maupun kaji banding, guna percepatan pencapaian target sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Adapun inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

- JEBOL PETI : Jemput Bola Perekaman KTP-el dengan Sepenuh Hati** yaitu Layanan jemput bola ke desa-desa, sekolah-sekolah, rumah warga yg sedang sakit, lansia, disabilitas, dan ODGJ, dalam rangka percepatan perekaman KTP-el dan pemenuhan hak seluruh penduduk atas identitas kependudukan.
- SI SIBAT KELILING : (Fasilitasi Sidang Itsbat Keliling)**
Fasilitasi penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah keliling bagi pasangan muslim, bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kemenag Kab. Barsel sebagai salah satu strategi peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/kawin tercatat, yang berujung pada peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak.



3. **SUPER PATEN : (Satu Permohonan Dapat Tiga Dokumen / Layanan Dokumen 3in1)**
Layanan dokumen 3 in 1, mengurus akta kelahiran anak dapat 3 dokumen (KK perubahan dengan penambahan anak, akta kelahiran anak & KIA)
4. **SUPER ENAK (Satu Permohonan Dapat Enam Dokumen / Layanan Dokumen 6in1)**
Layanan dokumen 6 in 1, mengurus akta perkawinan dapat 6 dokumen (KK perubahan orang tua suami, KK perubahan orang tua istri, KK baru suami istri, akta perkawinan, KTP-el masing-masing dengan perubahan status perkawinan)
5. **SENI KULIT & TALI (Selesai Nikah Dokumen Komplit, data Valid)**
Inovasi Disdukcapil Kab. Barsel dalam mewujudkan layanan terintegrasi dengan KUA se-Kab. Barsel untuk memberikan kemudahan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke Dukcapil kepada calon pengantin/catin yang sudah mendaftar di KUA.
6. **PENSIL MAS (Pencatatan Sipil Masal)**
Inovasi Jemput Bola dalam rangka percepatan pemenuhan kepemilikan akta-akta pencatatan sipil (lahir, mati, kawin, cerai). Bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Buntok, untuk melakukan sidang sekaligus pencatatan perkawinan/perceraian secara keliling/di tempat bagi pasangan non muslim yang perkawinan/perceraiannya belum tercatat.
7. **SI-DUTA (Sistem Informasi Dukcapil Untuk Semua)**
Pelayanan Online Pengurusan Dokumen Adminduk Dukcapil Barsel dengan Menggunakan Aplikasi Berbasis Web.
8. **GERUDUK DESA (Gerai Adminduk Desa)**
Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Gerai Adminduk Desa (Geruduk Desa), yang merupakan kerjasama antara Disdukcapil dengan Pemerintah Desa untuk membuka tempat pelayanan adminduk di Kantor Desa.
9. **BALITA EMAS (Bayi Lahir Dapat Akta di Rumah Sakit, Pustu dan Puskesmas)**
Inovasi Layanan Terintegrasi Disdukcapil Kab. Barsel bekerjasama dengan RSUD Jaraga Sasameh, Pustu dan Puskesmas di Kabupaten Barito Selatan dalam rangka pemberian kemudahan untuk membuat Akta Kelahiran Anak.
10. **ASI KIA (Edukasi dan Fasilitasi Kepemilikan KIA)**
Inovasi Disdukcapil bekerja sama dengan Dinas Pendidikan/Lembaga Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan dalam rangka memberikan edukasi dan fasilitasi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi Siswa/Siswi Peserta Didik.

Gambar 7. Pelaksanaan Inovasi “JEBOL PETI” (Jemput Bola Perekaman KTP-el dengan Sepenuh Hati) Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan



Gambar 8. Pelaksanaan INOVASI “SI SIBATKELING “ (Fasilitasi Sidang Itsbat Keliling) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan



Gambar 9. Inovasi Pelayanan Online “SI -DUTA” (Sistem Informasi Dukcapil Untuk Semua)



3.3.2. Faktor penghambat :

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti peralatan komputer, peralatan perekaman *mobile*, mobil pelayanan keliling, serta SDM.
- 2) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan (sadar akan pemutakhiran data KK, sadar akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan, sadar akan pentingnya nikah tercatat).
- 3) Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih belum mencapai target kinerja 30% dari Total Perekaman di daerah disebabkan beberapa faktor, antara lain:
 - Masih kurangnya antusias warga dalam melakukan aktivasi IKD dikarenakan fungsi dan kegunaannya masih belum terimplementasi secara menyeluruh di semua lembaga pelayanan publik, hanya beberapa lembaga perbankan dan sebagian kecil lembaga pelayanan publik yang telah mengintegrasikan penggunaan IKD dalam penyelenggaraan layanannya, sedangkan sebagian besar lainnya masih mensyaratkan penggunaan dokumen fisik secara manual;
 - Masih banyak warga yang belum/tidak menggunakan smartphone, sebagai syarat kepemilikan/aktivasi IKD;
 - Fungsionalitas IKD yang hanya bisa digunakan secara online / terhubung ke jaringan internet (tidak bisa offline sehingga aksesnya hanya terbatas bagi warga yang berada dalam jangkauan jaringan internet);
 - Proses aktivasi dan penggunaan aplikasinya yang masih sering terjadi gangguan dari pusat.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :

- 1) Memaksimalkan sumber daya yang ada, sembari mengusulkan / melakukan penambahan sarana prasarana secara bertahap.
- 2) Aktif melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran di masyarakat, melalui media informasi/media sosial, serta melalui para petugas register desa/kelurahan.
- 3) Mengimplementasikan SE Bupati Barito Selatan No.: 470/167/DUKCAPIL, tgl. 1 Maret 2024 tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi SI-DUTA dan IKD dalam Pengurusan Dokumen Adminduk pada Dinas Dukcapil kab. Barsel;
- 4) Aktif melakukan sosialisasi tentang manfaat dan kegunaan IKD kepada seluruh masyarakat, baik secara langsung saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, melalui pamflet dan pemasangan banner di ruang pelayanan, melalui berbagai media sosial maupun sosialisasi oleh petugas register desa/kelurahan;
- 5) Melakukan aktivasi secara aktif kepada masyarakat yang datang berurusan ke dukcapil, serta melaksanakan layanan jemput bola aktivasi IKD.

3.4. Realisasi Kinerja Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran dan target yang telah ditetapkan. Terkait pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 6.384.076.702,00** atau **92,85 %** dari total pagu anggaran yang disediakan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 6.875.773.590,08 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Dukcapil Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Persentase
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	6.875.773.590,08	6.384.076.702,00	92,85%
5.1	BELANJA OPERASI	6.776.733.590,08	6.287.213.902,00	92,77%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.988.805.466,08	2.905.305.344,00	97,20%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.787.928.124,00	3.381.908.558,00	89,28%
5.2	BELANJA MODAL	99.040.000,00	96.862.800,00	97,80%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.040.000,00	96.862.800,00	97,80%

Tabel 8. Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG (KELOMPOK 1)				
	Belanja Pegawai (Jenis Belanja --> ini tidak tergantung program)		2.988.805.466,08	2.905.305.344,00	97,20
B.	BELANJA LANGSUNG (KELOMPOK 2)				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.323.374.530	4.925.981.622	92,53
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.535.650	188.162.200	86,50
	1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.899.800	4.502.000	91,88
	1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.100.000	2.485.000	80,16
	1.1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2.099.800	1.640.000	78,10
	1.1.4	Koordinasi dan penyusunan DPA-RKPD	2.999.900	2.446.000	81,54
	1.1.5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-RKPD	9.640.000	9.343.000	96,92
	1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.997.900	29.738.000	84,97
	1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.798.250	138.008.200	86,36
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.137.859.616	3.024.282.544	96,38
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.988.805.466,08	2.905.305.344	97,21
	1.2.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	123.240.000	99.410.000	80,66
	1.2.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3.999.900	3.697.900	92,45
	1.2.4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4.500.000	3.505.000	77,89
	1.2.5	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2.314.000	0	0
	1.2.6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	15.000.250	11.862.000	79,08
	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.225.102.050	1.141.791.811	93,20
	1.3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.404.000	7.411.000	88,18
	1.3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	248.219.100	223.814.755	90,17
	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.556.950	44.581.000	66,98
	1.3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.155.800	12.150.000	92,35
	1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000	2.860.000	81,71
	1.3.6	Penyediaan bahan/material	15.419.200	14.621.000	94,82
	1.3.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	601.876.000	585.639.406	97,30



		1.3.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada SKPD	239.856.000	228.977.650	95,46
		1.3.9	Fasilitasi kunjungan tamu	28.115.000	21.737.000	77,31
		1.3.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	0	-	0,00
	1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16.770.000	15.300.000	91,23
		1.4.1	Pengadaan Mebel	16.770.000	15.300.000	91,23
		1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
		1.4.3	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0	0	0
		1.4.4	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	0
	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		434.245.464	304.348.367	70,09
		1.5.1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	1.800.000	60,00
		1.5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	183.884.664	165.648.367	90,08
		1.5.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	244.200.000	134.150.000	54,93
		1.5.4	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.160.800	2.750.000	87,00
	1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		175.140.650	156.280.500	89,23
		1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, Kendaraan dinas operasional atau lapangan	105.410.000	95.825.800	90,91
		1.6.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	31.553.600	29.894.700	94,74
		1.6.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25.150.000	17.610.000	70,02
		1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
		1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.027.050	12.950.000	99,41
	1.7	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		21.005.100	14.078.000	67,02
		1.7.1	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	4.500.000	2.658.000	59,07
		1.7.2	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	3.005.500	1.735.000	57,73
		1.7.3	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5.000.000	3.566.000	71,32
		1.7.4	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	5.999.400	3.868.800	64,49
		1.7.5	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	2.500.200	2.250.200	90,00
	1.8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95.716.000	81.738.200	85,40
		1.8.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	0
		1.8.2	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4.816.000	4.252.000	88,29



		1.8.3	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2.500.000	2.429.000	97,16
		1.8.4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	88.400.000	75.057.200	84,91
2	Program Pendaftaran Penduduk			396.662.600	388.594.008	97,97
	2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		298.187.300	291.703.208	97,83
		2.1.1	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	298.187.300	291.703.208	97,83
	2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		83.999.800	83.696.800	99,64
		2.2.1	Fasilitasi pendaftaran penduduk	83.999.800	83.696.800	99,64
	2.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		14.475.500	13.194.000	91,15
		2.3.1	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	14.475.500	13.194.000	91,15
3	Program Pencatatan Sipil			519.999.810	482.639.700	92,82
	3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil		186.829.810	184.812.100	98,92
		3.1.1	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	186.829.810	184.812.100	98,92
	3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		333.170.000	297.827.600	89,39
		3.2.1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	215.704.500	212.780.500	98,64
		3.2.2	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	117.465.500	85.047.100	72,40
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			535.427.150	500.650.772	93,50
	4.1	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		392.556.400	356.873.052	90,91
		4.1.1	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	204.926.700	185.011.872	90,28
		4.1.2	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	187.629.700	171.861.180	91,60
	4.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		56.335.000	55.126.000	97,85
		4.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.335.000	55.126.000	97,85
	4.3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		86.535.750	83.617.720	96,63
		4.2.1	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	86.535.750	83.617.720	96,63
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			100.309.500	91.746.900	91,46
	5.1	Penyusunan Profil Kependudukan		100.309.500	91.746.900	91,46
		5.1.1	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	100.309.500	91.746.900	91,46
TOTAL BELANJA				6.875.773.590	6.384.076.702	92,85

3.5. Analisis Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2025 menunjukan bahwa beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencapaian target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan.

Analisis efisiensi capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan capaian kinerja anggaran dapat digambarkan dalam tabel 9 berikut :

Tabel 9. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	A	A	100%	92,85%	7,15%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel dan Bebas dari Korupsi	Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	75,00	79,18	105,6%		12,75%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,10	3,027 *	97,6%		4,75%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71,00	65,45 *	92,2%		-0,65%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tahun anggaran 2025 rata-rata sangat baik dengan realisasi capaian melebihi 90%, bahkan terdapat indikator dengan capaian memuaskan karena mencapai dan melebihi 100% dengan menunjukan efisiensi anggaran yang cukup tinggi, yaitu indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan indikator Angka MCP Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

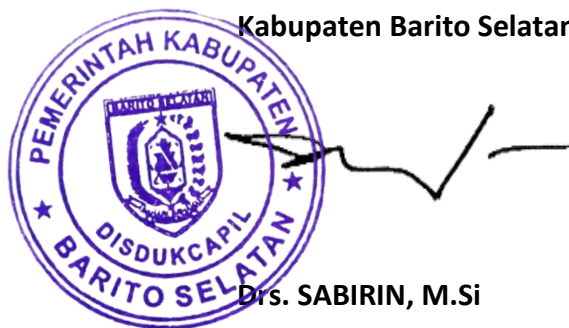
LaKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan dalam tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sudah dapat dikategorikan **BERHASIL**, dengan rata-rata tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, dan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran yang tinggi.

Masih adanya kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja di tahun 2025 ini akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Seiring dengan perbaikan kinerja, upaya-upaya dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat juga akan terus dilakukan, untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, Pebruari 2026.

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Selatan**



Drs. SABIRIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680303 199012 1 004

LAMPIRAN :

JUMLAH WAJIB KTP DAN CAPAIAN PEREKAMAN KTP-el KABUPATEN BARITO SELATAN					
SEMESTER II TAHUN 2025					
No.	KECAMATAN	JLH WKTP	SUDAH REKAM	% REKAM	BELUM REKAM
1	JENAMAS	6.609	6.242	94,45	367
2	DUSUN HILIR	12.299	11.893	96,70	406
3	KARAU KUALA	11.938	11.705	98,05	233
4	DUSUN UTARA	12.851	12.500	97,27	351
5	GUNUNG BINTANG AWAI	14.890	14.516	97,49	374
6	DUSUN SELATAN	44.017	43.291	98,35	726
JUMLAH		102.604	100.147	97,61	2.457

JUMLAH CAPAIAN KEPEMILIKAN AKTA LAHIR ANAK USIA 0-18 DI KABUPATEN BARITO SELATAN					
SEMESTER II TAHUN 2025					
No.	KECAMATAN	JUMLAH TARGET DAN CAPAIAN AKTA LAHIR ANAK			
		WAJIB AKTA	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	% KEPEMILIKAN
1	JENAMAS	2.525	2.405	120	95,25
2	DUSUN HILIR	4.626	4.418	208	95,50
3	KARAU KUALA	4.210	3.997	213	94,94
4	DUSUN UTARA	4.520	4.383	137	96,97
5	GUNUNG BINTANG AWAI	5.758	5.503	255	95,57
6	DUSUN SELATAN	16.928	16.586	342	97,98
JUMLAH		38.567	37.292	1.275	96,69

JUMLAH CAPAIAN KEPEMILIKAN KIA DI KABUPATEN BARITO SELATAN					
SEMESTER II TAHUN 2025					
No.	KECAMATAN	JUMLAH TARGET DAN CAPAIAN KEPEMILIKAN KIA			
		WAJIB KIA	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	% KEPEMILIKAN
1	JENAMAS	2.351	1.606	745	68,31
2	DUSUN HILIR	4.350	2.433	1.917	55,93
3	KARAU KUALA	3.921	2.517	1.404	64,19
4	DUSUN UTARA	4.166	3.138	1.028	75,32
5	GUNUNG BINTANG AWAI	5.381	3.930	1.451	73,03
6	DUSUN SELATAN	15.765	12.335	3.430	78,24
JUMLAH		35.934	25.959	9.975	72,24

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BARITO SELATAN				
SEMESTER II TAHUN 2025				
No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	JENAMAS	4.601	4.359	8.960
2	DUSUN HILIR	8.629	8.020	16.649
3	KARAU KUALA	8.133	7.726	15.859
4	DUSUN UTARA	8.835	8.182	17.017
5	GUNUNG BINTANG AWAI	10.450	9.818	20.268
6	DUSUN SELATAN	30.339	29.443	59.782
JUMLAH		70.987	67.548	138.535



DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

TRIWULAN IV TAHUN 2025

NILAI IKM :



MUTU PELAYANAN :

A

SANGAT BAIK

NAMA LAYANAN	: DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
RESPONDEN	
Jumlah	: 100 orang.
Jenis Kelamin (L/P)	: 49 / 51
Pendidikan	: SD : 5
	SMP : 14
	SMA : 45
	D.III : 13
	S1 : 20
	S2 : 3
Periode Survei	: November s.d. Desember 2025.
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH DIBERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	